

Indonesia Darurat Narkoba

- Tiga Jutaan Warga Terpapar
- Mayoritas Pengguna Generasi Muda

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan Indonesia memasuki darurat narkoba. Menurutnya, Indonesia tak lagi sebatas target negara konsumsi semata, tapi di beberapa wilayah telah berkembang produsen narkoba.

■ Bersambung ke Hal 11

BNN Geledah Rumah Polisi Pengendali Narkoba Sumut-NTB



BADAN Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur mengeledah rumah Aiptu Arif Susilo, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (5/12).

Pengeledahan berlangsung di rumah Arif di Taman Indah Regency, Sidoarjo, sekitar pukul 10.00 WIB.

■ Bersambung ke Hal 11

BNNP Jatim mengeledah rumah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang berada di Sidoarjo. Oknum itu diduga pengendali peredaran narkoba Sumut-NTB. (Foto CNN Indonesia)



Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyebut Indonesia darurat narkoba dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024. (Foto ntvnews)

Presiden Minta TNI Turun Tangan

PRESIDEN Prabowo Subianto telah menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turun tangan menangani kasus penyalahgunaan narkoba, judi online, korupsi, dan penyelundupan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Markas Besar TNI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang mulai aktif sejak 13 November 2024 lalu. Satgas ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi empat sub-satgas yang fokus pada masing-masing jenis kejahatan. Perintah ini dikeluarkan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024.

Satgas khusus ini akan

bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menegaskan bahwa peran TNI hanya sebagai pendukung dalam penegakan hukum, bukan sebagai pelaksana utama.

■ Bersambung ke Hal 11

KPK LELANG BARANG RAMPASAN, MOBIL DAN TAS MEWAH JADI PERHATIAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Aanwijzing lelang barang rampasan hasil kasus korupsi yang ditangani di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Jakarta, Kamis, (5/12/2024). Kegiatan Aanwijzing lelang barang rampasan hasil kasus korupsi bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kegiatan lelang barang ini juga merupakan bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Barang barang sitaan yang dilelang meliputi kendaraan bermotor, perhiasan, alat elektronik, dan barang berharga lainnya. (Foto Liputan6.com)

Jadwal Salat

4 JUMADIL AKHIR 1446 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:17 WIB
Zuhur : 12:19 WIB	Isya : 19:30 WIB
Ashar : 15:42 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Mahasiswa Rentan Narkoba

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



BERDASARKAN survei, pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan terpapar narkoba. Penyebaran narkoba ke sekolah dan kampus menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jutaan orang di Indonesia teridentifikasi sebagai pengguna narkoba. Meskipun jumlahnya fluktuatif, ancaman narkoba menasar berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga profesional.

■ Bersambung ke Hal 11

Nasib Tokoh Agama yang Hina Penjual Es Teh

7 Petisi Desak Prabowo Copot Miftah

PETISI yang mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bermunculan, Rabu (4/12). Setidaknya ada tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Miftah dicopot karena mengolok-olok penjual es teh.

Petisi berjudul Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Presiden menjadi petisi dengan dukungan terbanyak. Sudah ada 3.535 orang yang menandatangani petisi itu pada pukul 20.14 WIB.

Petisi itu dibuat Dika Prakasa dan ditujukan ke Presiden Prabowo Subianto. Dika merasa pernyataan Miftah tak memberi contoh baik ke publik.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti



ini sudah terjadi beberapa kali. Untuk itu, agar jajaran bapak sejalan dengan bapak, segera copot Gus Miftah!" bunyi petisi tersebut.

Selanjutnya ada petisi berjudul Copot Miftah Maulana Habiburrahman Sebagai Utusan Khusus Presiden. Petisi ini telah ditandatangani 1.278 orang.

Lima petisi lainnya baru ditandatangani puluhan orang. Petisi-petisi itu berjudul MULUT MIFTAH COMBERAN,

RAKYAT MARAH! PRESIDEN HARUS PECAT!, Hentikan Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden, dan Berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden.

Kemudian, ada petisi TOLAK GUS MIFTAH YANG SUKA MERENDAHKAN SESAMA MANUSIA. Ada pula petisi Desak Gus Miftah atau Miftah Maulana Habiburrahman mundur dari jabatannya.

■ Bersambung ke Hal 11

Ketua KPK Pastikan OTT Bakal Dilanjutkan

Jakarta, MIMBAR - Ketua KPK terpilih periode 2025-2029 Setyo Budiarto memastikan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) bakal dilanjutkan di periode kepemimpinannya.

"Sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper OTT tetap lanjut," kata Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurutnya, semua pimpinan KPK bakal sepakat untuk melanjutkan OTT. Setyo mengatakan diskusi yang muncul hanya soal penamaan OTT.

"Sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu, apa nomenklatur," katanya.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Lemah ...

■ Hehehe...

Presiden Minta...

Dari Halaman 1

“TNI akan memberikan dukungan penuh kepada instansi terkait, terutama dalam hal operasional dan logistik, tetapi tetap menghormati hukum yang berlaku,” ujar Sjafriz seperti dilansir dari fokusnasateng-gara.com, Kamis (5/12).

Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, meskipun beberapa pihak mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif memberantas kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. (jfn/s)



Hidayah Mahasiswa Rentan...

Dari Halaman 1

Indonesia menjadi salah satu target besar jaringan internasional narkoba. Banyak kasus penyelundupan besar yang berhasil diungkap, menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pasar potensial dan bahkan tempat transit bagi narkoba.

Narkoba tidak hanya merusak individu tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat. Kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, termasuk biaya rehabilitasi, pengobatan, dan penegakan hukum.

Pemerintah melalui BNN, Kepolisian, dan lembaga terkait telah meningkatkan upaya pemberantasan, termasuk eksekusi mati untuk bandar narkoba. Namun, tantangan masih besar, seperti korupsi, lemahnya pengawasan di perbatasan, dan keterbatasan rehabilitasi.

Meski istilah darurat narkoba kadang dianggap hiperbolis, kenyataannya menunjukkan bahwa ancaman narkoba adalah masalah serius di Indonesia. Penanganan harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menekan dampaknya.

Faktor penyebab Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga hukum.

Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang. Hal ini memudahkan penyelundupan narkoba, terutama di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua.

Permintaan narkoba di dalam negeri sangat besar, terutama di kalangan remaja, mahasiswa, dan pekerja. Faktor-faktor seperti tekanan hidup, gaya hidup hedonis, dan rasa ingin tahu sering menjadi alasan utama seseorang mencoba narkoba.

Indonesia menjadi target utama bagi jaringan narkoba internasional, terutama dari wilayah Asia seperti “Golden Triangle” (Thailand, Laos, Myanmar) dan “Golden Crescent” (Afghanistan, Pakistan, Iran). Banyak bandar besar menggunakan Indonesia sebagai pasar utama dan transit ke negara lain.

Minimnya edukasi tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja, membuat mereka lebih mudah terjebak. Pendidikan pencegahan sering kali tidak menjadi prioritas di sekolah atau keluarga.

Kemiskinan dan pengangguran mendorong sebagian orang terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Keuntungan cepat dari bisnis narkoba sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.

Korupsi di institusi penegak hukum, seperti polisi, bea cukai, atau lembaga pemasyarakatan, membuat peredaran narkoba sulit diberantas. Kasus bandar narkoba yang tetap menjalankan bisnisnya dari dalam penjara adalah salah satu

contohnya. Sistem rehabilitasi di Indonesia masih terbatas, baik dari segi jumlah fasilitas maupun kualitas layanan. Banyak pengguna yang tidak mendapatkan akses rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka kembali ke lingkungan narkoba.

Kemajuan teknologi memudahkan transaksi narkoba secara daring (online). Media sosial dan aplikasi pesan instan digunakan sebagai sarana komunikasi yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Budaya konsumtif dan gaya hidup mewah di kalangan masyarakat perkotaan sering mendorong penggunaan narkoba sebagai bagian dari “gaya hidup” atau simbol status sosial.

Meski ada kerja sama antarnegara untuk memberantas narkoba, koordinasi sering kali kurang efektif. Hal ini memberi peluang bagi jaringan narkoba internasional untuk tetap beroperasi.

Dari perspektif teori komunikasi, fenomena “Indonesia darurat narkoba” dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana informasinya tentang narkoba, penggunaannya, dan upaya pencegahannya dikomunikasikan.

Menurut Teori Agenda-Setting, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks narkoba Media massa memberitakan secara masif kasus-kasus narkoba dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi “darurat narkoba.”

Media sering kali memframing isu narkoba sebagai ancaman besar, fokus pada kasus besar seperti penyelundupan atau eksekusi bandar narkoba, tanpa banyak menyoroti solusi jangka panjang seperti rehabilitasi. Implikasinya narasi “darurat narkoba” bisa memicu kesadaran masyarakat, tetapi juga dapat memunculkan ketakutan atau stigma terhadap pengguna narkoba.

Teori Risk Communication membahas bagaimana informasi tentang risiko (narkoba) disampaikan kepada publik. Kampanye pemerintah tentang bahaya narkoba sering kali menggunakan pendekatan menakutkan (fear appeal), tetapi tidak selalu efektif, terutama jika pesan tidak relevan dengan pengalaman audiens, seperti remaja.

Media sosial menjadi saluran penting, tetapi juga sering menjadi tempat penyebaran informasi keliru atau glorifikasi penggunaan narkoba.

Strategi berbasis komunikasi interpersonal, seperti konseling atau diskusi kelompok, dapat lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah melalui media.

Isu narkoba juga terkait erat dengan komunikasi kesehatan, termasuk bagaimana pesan pencegahan dan rehabilitasi disampaikan. Pesan harus disesuaikan dengan audiens, misalnya pendekatan berbeda untuk anak, remaja, dan orangtua. **

PDIP Minta Jokowi Kembalikan KTA

Jakarta, MIMBAR - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun berharap Presiden RI ketujuh, Joko Widodo segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai miliknya.

Menurut Komar, Jokowi secara de facto bukan lagi anggota partainya. Dia menganggap pernyataannya yang masih memiliki KTA tidak tahu malu saja itu,” kata Komar di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/12) malam.

Selama ini, lanjut Komar, partainya tak bisa langsung memecat

Jokowi karena yang bersangkutan merupakan Presiden. Bagaimanapun, katanya, partai tetap ingin menjaga kehormatan Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI.

“Beberapa waktu lalu, Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP itu kan sejak beliau masih aktif jadi Presiden, bagaimanapun kita tetap jaga kehormatan dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi itu kita jaga. Tidak bisa kita ambil tindakan pemecatan,” katanya.

Komar menegaskan bahwa dirinya tidak tebang pilih menegakkan sanksi disiplin partai. Dia mengaku telah diberi tugas oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menjaga kehormatan partai dan integritas ketua umum.

Oleh karena itu, disiplin itu berlaku ke semua kader dari Sabang sampai Merauke. Termasuk di dalamnya kepada Jokowi.

Menurut dia, selama pihaknya telah bersikap baik kepada Jokowi dan keluarga. Karenanya, mengembalikan kartu tanda anggota (KTA), kata Komar, merupakan langkah terhormat yang bisa dilakukan Jokowi saat ini.

“Makanya kita bicara sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi kembalikan kartu tanda anggota. Itu sudah sangat terhormat itu kita jaga kehormatan dan wibawa mereka juga,” katanya.

Komar menegaskan partai tetap akan melakukan mekanisme yang berlaku. Menurut dia, pihaknya tak akan segan untuk mengambil langkah pemecatan jika Jokowi

masih tak mau mengembalikan KTA.

Menurut Komar, tak ada kader yang istimewa kecuali Megawati Soekarnoputri. Sebab, dialah yang telah berdarah memperjuangkan partai sampai hari ini.

“Proses partai tetap berlangsung pada akhirnya kalau tidak dikembalikan, iya kan kita pecat. Tidak bisa begitu dong, masa yang lain kita pecat, Pak Jokowi ada keistimewaan apa?” kata Komar.

“Yang paling istimewa di PDIP Perjuangan itu hanya Megawati Soekarnoputri. Karena dia berjuang berdarah di partai sampai partai besar hari ini. Itu yang jadi pertimbangan tapi yang lain-lain ini siapa. Jadi jangan ketika partai sudah berhati, kasih jantung tidak bisa,” imbuhnya. (cnni/js)

HASIL REKAPITULASI PILGUB DKI

Pramono-Rano Menang 50,07 Persen

Jakarta, MIMBAR - KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota DKI Jakarta sudah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024, Kamis (5/12) siang.

Hasilnya, paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menjadi pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen. Pramono-Rano mendapatkan suara paling banyak yakni 2.183.239 suara. Mereka mengumpulkan 50,07 persen dari suara sah.

Di tempat kedua adalah paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau sekitar 39,40 persen suara sah.

Dan, di tempat ketiga adalah paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan perolehan 459.230 suara. Jumlah itu setara 10,53 persen suara sah.

Dari total rekapitulasi di enam wilayah itu, Pramono-Rano menang di semua kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Paslon yang diusung PDIP ini memperoleh suara lebih dari 50 persen di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, dan Jakarta Barat.

Jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di Pilgub DKI Jakarta 2024 ada 4.724.393 orang. Dari total

pengguna hak suara tersebut, suara sah ada 4.360.629 dan suara tidak sah ada 363.764 orang.

Daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub DKI Jakarta 2024 mencapai 8.214.007 orang. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih berada di angka 57,52 persen.

Hasil Pilgub DKI Jakarta 2024 baru akan ditetapkan melalui rapat pleno KPU DKI Jakarta.

Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jakarta di 6 Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Kepulauan Seribu (41 TPS)
Jumlah DPT: 20.908 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 653 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 7.456 suara
Pengguna hak pilih: 15.161 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 14.687, suara tidak sah sebanyak 474

2. Kota Jakarta Barat (3.452 TPS)
Jumlah DPT: 1.909.774 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun

Wardana: 109.457 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 500.738 suara
Pengguna hak pilih: 1.069.002 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 997.075, suara tidak sah sebanyak 71.927

3. Kota Jakarta Selatan (3.270 TPS)
Jumlah DPT: 1.748.961 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 90.294 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 491.017 suara
Pengguna hak pilih: 1.046.480 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 956.702, suara tidak sah sebanyak 89.778

4. Kota Jakarta Timur (4.144 TPS)
Jumlah DPT: 2.374.828 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 136.935 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 635.170 suara

Pengguna hak pilih: 1.425.834 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 1.307.718, suara tidak sah sebanyak 118.116

5. Kota Jakarta Utara (2.386 TPS)
Jumlah DPT: 1.345.815 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 77.026 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 328.486 suara
Pengguna hak pilih: 712.367 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 666.975, suara tidak sah sebanyak 45.392

6. Kota Jakarta Pusat (1.542 TPS)
Jumlah DPT: 813.721 orang
Paslon Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
Paslon Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 44.865 suara
Paslon Pramono Anung-Rano Karno: 220.372 suara
Pengguna hak pilih: 455.549 orang
Pemilih: suara sah sebanyak 417.472, suara tidak sah sebanyak 38.077. (cnni/js)

Ketua KPK...

Dari Halaman 1

Di sisi lain, terkait Pimpinan KPK yakni Johanes Tanak yang ingin menghapus OTT, Setyo mengaku belum bertemu untuk membahas itu.

“Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima, gitu. Itu kan penjelasan dulu. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi

penamaan saja, atau memang beliau tidak setuju,” ujarnya.

Lebih lanjut, di kepemimpinannya nanti, Setyo mengaku bakal mengaktifkan kembali kolektif kolejal dalam mengambil keputusan.

“Visi misi itu kan bukan visi misi saya, bukan visi misinya Pak JT, bukan visi misinya AJP, Pak Ibnu maupun Pak Fitroh, tapi visi misi berlima. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pimpi-

nan yang sebelumnya, yang baik pasti akan kami lanjutkan, yang kurang pasti akan kami evaluasi, untuk kemudian sebagai bahan perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang I 2024-2025 secara resmi telah mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. (cnni/js)

Indonesia Darurat...

Dari Halaman 1

“Indonesia bukan hanya menjadi konsumen narkoba. Namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12).

Budi mengatakan, pemerintah melalui Desk Pemberantasan Narkoba yang masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto akan terus menindak tegas kasus-kasus peredaran narkoba di Tanah Air.

Pemerintah, kata dia, juga akan fokus menelusuri, memblokir dana, hingga menerap-

kan pasal pencucian uang terhadap bandar dan pengedar.

Budi menyebut para bandar dan pengedar juga akan dikenakan hukuman pidana maksimal, termasuk hukuman mati untuk memberikan efek jera. “Sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan,” tegasnya.

Mayoritas Generasi Muda

Budi Gunawan menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai 3,3 juta orang. Peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya menasar kota besar, tapi juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

“Jumlah pengguna narkoba cukup besar

dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil,” kata Budi.

Ia mengatakan, dari total 3,3 juta orang itu, mayoritas merupakan kelompok generasi muda dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun.

Budi menyebut banyaknya pengguna itu sejalan dengan perputaran uang hasil transaksi narkoba di Indonesia. Pada periode 2022 hingga 2024, perputaran uang tercatat mencapai Rp99 triliun.

“Berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode tahun 2022-2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkoba mencapai Rp99 triliun,” tuturnya. (cnni/js)

BNN Geledah...

Dari Halaman 1

Pengeledahan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus narkoba.

“Ini kaitannya dengan penangkapan di wilayah Lombok yang dilakukan oleh BNN RI bekerja sama dengan BNNP NTB,” kata Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim, Noer Wistanto kepada wartawan, Kamis ini.

Ia menyebut, Arif tak ada dalam pengeledahan rumahnya tadi. Oknum polisi itu, kata dia, sudah ditahan di BNN Pusat sejak 19 Oktober lalu. “Hasil pengeledahan sekarang ditemukan 4 buku rekening atas nama saudara AS,” ujar Noer. Dalam kasus ini, Arif diduga berperan sebagai pengendali jaringan pengedar narkoba di dari Sumatera Utara, Surabaya hingga NTB.

“Kemudian saudara AS sendiri dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan adalah selaku pengendali pengiriman narkoba ini sampai dengan NTB,” ucapnya.

Ia ditangkap setelah dua anak buahnya yaitu Fattah dan Erwin lebih dulu ditangkap. Dari tangan mereka ditemukan barang bukti sabu sebanyak 2 kilogram.

Selama terlibat sebagai pengendali jaringan narkoba yang berasal dari Sumatera Utara, Arif diduga sudah tujuh kali melakukan transaksi.

“Dari keterangan yang bersangkutan bahwa sudah satu tahun ini, 2023 sampai 2024. Sudah 7 kali melakukan pengiriman langsung dari Sumut Medan ke NTB. Sekali kiriman 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram,” ucap Noer.

Selain mengeledah rumah Arif di Sidoarjo, BNNP Jatim juga tengah mengeledah dua rumah jaringan narkoba di Pasuruan.

Terpisah, Polda Jatim membenarkan salah satu anggotanya yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yakni Aiptu Arif Susilo ditangkap dan dikeledah Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait peredaran narkoba di NTB. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirman- to

menyebut rumah Aiptu Arif di Sidoarjo memang dikeledah Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim pada Kamis ini.

Dia mengatakan kegiatan pengeledahan tersebut merupakan wujud tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Ditresnarkoba Polda Jatim dan BNNP Jawa Timur.

“Pada saat pengeledahan juga didampingi anggota Bid Propam Polda Jatim,” kata Dirman- to melalui keterangannya, Kamis.

Dirman- to mengatakan Polda Jatim bakal menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat peredaran narkoba. Termasuk Aiptu Arif.

“Jika memang benar oknum tersebut terbukti terlibat Narkoba, sudah dipastikan Polda Jatim akan menindak tegas,” ucapnya.

Hal itu, kata Dirman- to, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto. Pimpinannya itu akan menindak tegas anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. (cnni/js)

7 Petisi...

Dari Halaman 1

Sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman menyita perhatian publik karena mengolok-olok penjual es teh. Saat diminta memborong dagangan penjual itu, Miftah malah melontarkan ucapan “goblok” kepada pedagang itu.

Miftah sendiri sudah meminta maaf ke publik melalui video dan meminta maaf langsung ke penjual teh, Sunhaji. Selain Miftahyang

sudah mendatangi Sunhaji, penjual es teh itu juga sudah datang ke tempat tinggal Miftah.

Enggan Respons

Miftah sendiri enggan merespons soal banyaknya desakan kepada pemerintah agar dirinya dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden. “Enggak usah tanya itu, enggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya. Udah, udah itu bukan wewenang saya,” kata Gus Miftah ditemui di Pongpes Ora Aji, Kalasan, Sleman,

DIY, Rabu (4/11).

Sementara Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima berbagai masukan. Hal itu ia sampaikan merespons desakan pencopotan Miftah.

“Ya semua aspirasi dari warga negara Indonesia, semua tokoh bangsa, baik kelas menengah, atas, ataupun bawah akan ditampung dan diperhatikan oleh Pak Presiden,” ucap Ujang. (cnni/js)